

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN BONTANG BARU KOTA BONTANG

Wahyu Saputro Akbar¹

Abstrak

Wahyu Saputro Akbar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang di bawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Edy Iskandar, S.sos, M.Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini menggambarkan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bontang. Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah dalam hal penertiban sampah dan kebersihan lingkungan dilaksanakan dan apa yang menjadi hambatan dalam implementasi peraturan daerah tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bontang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini tidak hanya Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang, Kepala dinas DKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang adalah kurangnya peranan, partisipasi masyarakat dan kedisiplinan masyarakat terhadap kebersihan, sehingga dengan jumlah aparat yang tidak seimbang, pelayanan dan kinerja dari aparat kurang maksimal.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengelolaan Sampah di Kota Bontang.*

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota diikuti dengan peningkatan berbagai aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat yang kemudian memunculkan masalah-masalah perkotaan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan tersebut. Secara umum kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan kota yang dapat mendukung kehidupan seluruh warganya. Persoalan lain yang timbul sebagai akibat semakin pesatnya jumlah penduduk kota adalah meningkatnya volume sampah. Jumlah atau volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Demikian juga jenis sampah, sangat

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: wahyucroboy@gmail.com

tergantung dari jenis material yang masyarakat konsumsi, oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat.

Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Kelurahan Bontang Baru yang terletak di wilayah Bontang Utara merupakan salah satu kelurahan yang tingkat pertumbuhan penduduknya yang terus mengalami peningkatan, dengan kepadatan penduduk ± 12.000 Jiwa dan, Jumlah sampah warga yang dihasilkan di Kelurahan Bontang Baru saat ini mencapai 91,87 ton/hari, sedangkan armada operasional yang bertugas untuk mengangkut sampah ada 2 mobil yang di siapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang untuk mengangkut sampah di 15 TPS yang berada di Kelurahan Bontang Baru untuk di bawa ke TPA yang berada di Bontang Lestari. Oleh karena itu untuk tetap menjamin ketertiban dalam pengelolaan sampah diperlukan upaya yang berkesinambungan, selain melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, upaya komprehensif dengan berbagai penanggulangan hingga penegakan hukum perlu dilakukan. Pada dasarnya sampah tidak diproduksi melainkan ditimbulkan, besarnya timbunan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis kegiatannya. Volume tumpukkan sampah memiliki nilai sebanding dengan tingkat konsumsi warga Kelurahan Bontang Baru terhadap material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Belum meratanya penerapan tempat pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Bontang Baru disebabkan oleh peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di perkotaan. Sampai saat ini peran serta di Kelurahan Bontang Baru yang belum menerapkan tempat pembuangan sampah terpadu secara umum hanya sebatas pembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan publik berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah kebijakan publik biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Webster (2005:43), merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan

sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Jenis-Jenis Kebijakan Publik.

William N. Dunn (2000:43) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

1. *Substantive and Procedural Policies.*
2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.*
3. *Material Policy.*
4. *Public Goods and Private Goods Policies.*

Sistem Kebijakan Publik.

Sistem kebijakan publik, menurut Mustopadidjaja AR (2009:43), adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (*target groups*). Sebagai suatu sistem, maka dalam sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur : Input, Process, Output. Kebijakan publik adalah merupakan produk (output) dari suatu input, yang diproses secara politis.

Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Menurut William.N. Dunn (2000;76) tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap Implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan

Implementasi

Menurut Budi Winarno (2002:32) tahap proses implementasi kebijakan:

- a. Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

- b. Terhadap berbagai faktor dalam implementasi kebijakan, memberikan gambaran dalam bentuk bagan atas determinan kinerja implementasi kebijakan. Dijelaskan bahwa ada 4(empat) faktor yang saling berinteraksi yang berfokus pada kinerja kebijakan, faktor tersebut secara berturut-turut adalah: 1) isi kebijakan; 2) political will; 3) karakteristik kelompok sasaran; 4) dukungan lingkungan.

Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Empat model pendekatan yang lazim dipergunakan dalam studi implementasi kebijakan public, model pendekatan implementasi kebijakan publik tersebut adalah model yang dikembangkan oleh Edward III, Van Matter dan Horn, Mazmanian dan Sabatier, Grindle, Hoogwood dan Gun serta Elmore (2005:34-37) antara lain-lain:

1. Pendekatan model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Model implementasi kebijakan publik dari Mazmanian dan Sabatier sering disebut sebagai A Framework for policy implementation analysis. Kedua ahli kebijakan ini mengemukakan pendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengimplementasikan variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Agustino, (2006:144-145) Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:
 - a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap;
 - b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat;
 - c) Variable di luar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
2. Pendekatan Metode Merilee S. Grindle
Pendekatan model implementasi versi Grindle adalah pendekatan Top Down dan dikenal dengan “implementation as a political and administrative proses”. Menurut model pendekatan ini ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.
3. Pendekatan Model Donald Van Horn dan Carl Van Horn
Van matter dan Van Horn dalam Wahab (2007:71) menyatakan bahwa :
“Implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang disengaja dilakukan untuk meraih kinerja dan merumuskan sebagai suatu abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan-kebijakan. Kinerja pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar sasaran”.
4. Pendekatan Model George C. Edward III
Pendekatan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III dalam Widodo (2001:195), menamakan model implementasinya dengan nama Direct and indirect impact on implementation. Pendekatan model ini

menyebut adanya empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah : communication atau komunikasi, resources atau sumber daya, disposition atau disposisi (sikap pelaksana) dan bureaucratic structure atau struktur birokrasi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh (Edward III dalam Ekowati (2005;65), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Pengertian Pengelolaan Sampah

Menurut Mochtar (2007:32), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan. Tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan menurut Azwar (2009:43), sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan (human waste) tidak termasuk didalamnya.

Tchobanoglous (2003) mengatakan pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (engineering), perlindungan alam (conservation), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

Menurut Cunningham (2004:87) tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan.

Metode Pengelolaan Sampah

Penerapan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R misalnya dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. Penanganan sampah 3-R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), *Recycle* (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R ditambah *Replace* (mengganti)

mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip tersebut di atas ditambah lagi dengan *Replant* (menanam kembali). Penanganan sampah 4-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

Menurut Slamet (2004:46) masalah pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena :

- a. Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan.
- b. Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.
- c. Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus.
- d. Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah.
- e. Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai tempat pembuangan sampah.
- f. Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan.
- g. Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk,

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang. Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

Dalam penelitian ini setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan menggunakan beberapa cara :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :
 - a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung.

- b. Wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan – keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi ini.
- c. Penelitian dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh – dokumen yang berkaitan dengan peran penulis melalui pengumpulan data dari dokumen pegawai dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang

Hasil Penelitian

Ketentuan Membuang Sampah

Istilah sampah pasti sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Jika mendengar istilah sampah, pasti yang terlintas dalam benak kita adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma busuk yang sangat menyengat. Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Dalam proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam itu berlangsung. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kondisi kesehatan manusia. Bila sampah dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius. Tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja akan mendatangkan serangga (lalat, kecoa, kutu, dan lai-lain) yang membawa kuman penyakit.

Berikut penulis mewawancarai Bapak Sofiansyah., S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bontang, penulis menanyakan mengenai jam berapa ketentuan membuang sampah beliau mengatakan:

“Ketentuan dari membuang sampah itu sudah di atur dalam Peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah, dimana ketentuan membuang sampah yaitu jam 18.00 – 06.00 pagi, selain jam yang sudah di tentukan maka masyarakat tidak boleh lagi untuk membuang sampah karena jika kedapatan ada yang membuang sampah diluar waktu sudah di terapkan maka akan di kenai denda Rp 50 juta rupiah, hal ini di lakukan untuk membuat efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah di luar waktu yang telah di tentukan, tentunya hal ini kami lakukan untuk meminimalisir bau yang tidak sedap bagi masyarakat yang tinggal di area sekitar TPS atau masyarakat yang melawati tempat tersebut” (wawancara 22 Desember 2016).

Berdasarkan penjelasan dari wawancara diatas masyarakat bontang masih banyak yang tidak membuang sampah pada jam yang telah ditentukan dengan berbagai alasan. Masih banyak warga yang tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan tertulis tersebut terpampang disetiap TPS. Adapun alasan lain yaitu lokasi TPS cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal mereka sehingga tidak membuang sampah pada waktu yang ditentukan hal ini diakibatkan karena

pengawasan yang diberikan oleh Satpol PP untuk menjalankan Perda pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efektif oleh karena itu pihak DKP akan melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait agar untuk mengefektifkan perda tersebut.

Kemudian Penulis mewawancarai Sekertaris Lurah Bontang Baru yakni Bapak Rendi, S.IP penulis menanyakan mengenai apakah kelurahan telah menginformasikan ketentuan ketentuan dalam membuang sampah kepada masyarakat di Kelurahan Bontang Baru, beliau mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya kelurahan sebagai perpanjangan pemerintahan telah mensosialisasikan kepada masyarakat melalui Ketua RT, selanjutnya informasi dari kelurahan tersebut diberikan kepada masyarakat melalui sebuah forum rembuk warga” (wawancara 23 Desember 2016)

Berdasarkan pendapat ketiga diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui adanya peraturan dalam membuang sampah yang telah ditentukan dalam Perda No 4 tahun 2004, terkait sanksi juga telah diketahui oleh masyarakat, namun untuk denda akibat pelanggaran belum pernah ada masyarakat yang menerima, pelanggaran dalam membuang sampah hanya diberikan teguran-teguran secara lisan.

Tempat Penampungan Sampah (TPS)

Penyediaan tempat penampungan sampah (TPS) sementara yang memadai sangat diperlukan untuk tempat menampung sampah, jika tidak suatu daerah akan mengalami masalah yang serius. Masalah sampah apabila tidak cepat ditangani secara benar, tidak menutup kemungkinan suatu daerah lama-kelamaan akan tenggelam dalam timbunan dan tumpukan sampah menyediakan dan membangun tempat penampungan sampah (TPS) sementara diperlukan kriteria persyaratan fisik maupun persyaratan sosial ekonomi agar keberadaannya tidak membahayakan dan aman bagi lingkungan sekitar.

Pembuatan dan konstruksi tempat penampungan sampah (TPS) sementara pada umumnya berupa bak beton atau batu bata yang pada bagian atasnya terbuka dan dilengkapi dengan lubang pintu. Ukuran-ukuran dari tempat penampungan sampah (TPS) sementara sangat bervariasi, tergantung dari besar kecilnya produktivitas sampah pada daerah masing-masing, namun secara umum tempat penampungan sampah (TPS) sementara biasanya dapat menampung sampah lebih dari 4 m³.

Berikut penulis mewawancarai Bapak Sofiansyah., S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bontang. Penulis menanyakan apa ciri atau syarat tempat pembuangan sampah yang baik beliau mengatakan bahwa:

“Ciri dan syarat untuk tempat pembuangan sampah yang baik yaitu di jaga tempat-tempat pembuangan sampah dan kami dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) selalu menyiram TPS setiap seminggu sekali untuk menjaga TPS agar tetap awet selain itu ciri tempat pembuangan sampah yang baik yaitu masyarakat harus mampu

membedakan dan memisahkan saat membuang sampah antara sampah organik, sampah non organik dan sampah plastik. (wawancara 22 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa untuk menjaga kebersihan dan menjaga asset TPS maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) selalu membersihkan setiap TPS dan bak-bak sampah setiap seminggu sekali. Selain itu Dari pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah mulai dari masyarakat yang diberi pembinaan oleh kelurahan untuk memanfaatkan sampah. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos dan sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi wadah-wadah, yang tentu saja menghasilkan pundi ekonomi.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Bapak Sabransyah. SH selaku kepala bidang kebersihan dan menanyakan apakah pengambilan sampah teratur dan beliau mengatakan bahwa:

“Pengambilan sampah yang Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) lakukan sudah teratur dan sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam pengembalian sampah ada 3 tim yang bertugas yang pertama yaitu tim pengangkutan sampah rutin, yang kedua tim pengangkutan gelandang yaitu tim yang bertugas mengangkut sampah setelah tim rutin selesai mengangkut sampah, yang ketiga adalah tim saggas (sapu bersih sampah), tim saggas ini bertugas untuk menyapu sisa-sisa sampah dari hasil pengambilan dari tim rutin dan tim gelandang.” (wawancara 22 desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa untuk pengambilan sampah DKP sudah melakukan manajemen waktu sesuai dengan waktu yang sudah di tetapkan dan diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah, untuk pengambilan sampah DKP sudah menyiapkan 3 tim yaitu tim pengangkut rutin, tim pengangkut gelandang, dan tim saggas, yang diman 3 tim tersebut sudah memiliki tugas dan fungsinya sendiri dan tim tersebut bekerja sesuai dengan jam yang di terapkan untuk setiap tim.

Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah adalah subsistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila, terdapat sarana pemindahan sampah dalam skala cukup besar yang harus menangani sampah, lokasi titik tujuan sampah relatif jauh, sarana pemindahan merupakan titik pertemuan masuknya sampah dari berbagai area, ritasi perlu diperhitungkan secara teliti lintas jalur menuju titik sasaran tujuan sampah. Pengangkutan sampah di definisikan sabagai upaya atau kegiatan

memindahkan massa sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA). Lokasi TPS bila memungkinkan harus dekat dengan sumber sampah.

Berikut penulis mewawancarai Bapak Sofiansyah., S.Sos., M.Si selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bontang. Penulis menanyakan ada berapa armada yang disediakan DKPP untuk mengangkut sampah di setiap kecamatan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengangkutan sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) membagi perwilayah diantaranya kecamatan bontang utara, kecamatan bontang selatan dan kecamatan bontang barat ketiga kecamatan tersebut memiliki 18 personil, 18 mobil sampah dan 64 kru yang terbagi dalam 4 kru untuk setiap mobil sampah hal ini di harapkan dapat mengoptimalkan petugas dalam pengangkutan sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah di setiap TPS.” (wawancara 22 Desember 2016).

Berdasarkan hasil penjelasan dari narasumber didapat bahwa untuk pengangkutan sampah dari TPS di setiap 3 kecamatan maka DKP menyiapkan 18 personil, 18 mobil sampah dan 64 kru untuk setiap kecamatan hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengangkutan sampah di setiap kecamatan.

Pengelolaan Dan Pemusnahan Sampah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Bontang pada pasal 1 ayat 10 yaitu pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lain).

Berikut penulis mewawancarai Bapak Drs. Sarifudin selaku Kepala UPT Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Penulis menanyakan apa saja kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan Pemerintah:

“Pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah tidak hanya pada saat sampah sudah dibawa atau diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi berawal dari warga atau masyarakat. Mereka melalui kelurahan dibina untuk menjadi kreatif dalam memanfaatkan sampah. Melalui pemilahan sampah seperti sampah organik, plastik atau kaca dan besi. Sampah-sampah yang sudah melalui proses pemilahan kemudian didaur ulang sedemikian rupa untuk pemanfaatan lainnya dan juga dapat menjadi produk yang menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Seperti sampah organik yang dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, sampah plastik kemasan dimanfaatkan untuk membuat wadah-wadah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pengolahan sampah yang dilakukan pemerintah mulai dari masyarakat yang diberi pembinaan oleh kelurahan untuk memanfaatkan sampah. sampah organik dapat dimanfaatkan

menjadi pupuk kompos dan sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi wadah-wadah, yang tentu saja menghasilkan pundi ekonomi. Dalam skala besar pemerintah melakukan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir tidak hanya sebagai tempat pembuangan akhir sampah tetapi juga tempat produksi, edukasi dan rekreasi. Pemerintah melakukan pengolahan sampah sesuai dengan jenis.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang

1. *Warga setempat belum terpadu untuk menanggulangi sampah rumah tangga*

Kesadaran warga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di kota bontang masih tergolong rendah, hal tersebut ditandai dengan adanya perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, seperti misalnya membuang sampah di pinggir-pinggir jalan dan lain-lain.

2. *Pendanaan yang belum cukup*

Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleks jenis maupun komposisi dari jenis sampah, seiring dengan semakin maju dan berkembangnya kebudayaan. Masalah yang sering muncul pada penanganan sampah kota adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang tersedia sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu masalah pendanaan juga menjadi masalah yang dapat menghambat proses implementasi suatu kebijakan publik, seperti yang terjadi di kota bontang. Upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota bontang dilakukan secara bertahap karena dana APBD yang terbatas. Hal itu diakibatkan dan dana tersebut harus di bagi dengan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, transportasi, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Kesimpulan

1. *Ketentuan Membuang Sampah*

Ketentuan dari membuang sampah sudah di atur dalam Peraturan daerah nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah Kota Bontang, dimana ketentuan membuang sampah yaitu jam 18.00 – 06.00 pagi, selain jam yang sudah di tentukan maka masyarakat tidak boleh lagi untuk membuang sampah karena jika kedapatan ada yang membuang sampah diluar waktu sudah di terapkan maka akan di kenai denda Rp 5 juta rupiah, hal ini di lakukan untuk membuat efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah di luar waktu yang telah di tentukan

2. *Tempat Penampungan Sampah,*

Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara pada umumnya berupa bak beton atau batu bata yang pada bagian atasnya terbuka dan dilengkapi

dengan lubang pintu. Ukuran-ukuran dari tempat penampungan sampah (TPS) sementara sangat bervariasi, tergantung dari besar kecilnya produktivitas sampah pada daerah masing-masing, selain itu DKP juga menyediakan tempat untuk sampah basah, sampah kering, sampah organik dan non organik hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses pengelolaan sampah di TPA. Jenis sampah yang diolah adalah organik, sampah tersebut diolah menjadi pupuk kompos dan gas metan.

3. Pengangkutan Sampah

Petugas kebersihan melakukan pengangkutan dengan 3 interval waktu yaitu jam 12.00 malam, 06.00-09.00 pagi dan 10.00-11.00 pagi. Setiap truk pengangkut mempunyai target 2 rit per hari, setelah itu satgas kebersihan berkeliling untuk mengecek TPS. Semua angkutan sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir yaitu TPA.

4. Pengelolaan Dan Pemusnahan Sampah

Pengelolaan persampahan merupakan bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya), reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lain salah satunya yaitu digunakan sebagai gas metan yang dapat di salurkan kepada masyarakat. Sedangkan untuk pemusnahan sampah yang tidak bisa didaur ulang, DKP tidak membakar tetapi DKP menggunakan insulator yang khusus untuk memusnahkan sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti bahan-bahan berbahaya dan limbah dari rumah sakit.

5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan tentang pengelolaan sampah Kota Bontang adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai masalah sampah walaupun masyarakat telah mengetahui aturan tentang penertiban sampah melalui berbagai macam kegiatan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang, Selain itu masalah pendanaan juga menjadi masalah yang dapat menghambat proses implementasi suatu kebijakan publik, seperti yang terjadi di kota bontang. Upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota bontang dilakukan secara bertahap karena dana APBD yang terbatas. Hal itu diakibatkan dana tersebut harus di bagi dengan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, transportasi, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Saran

1. Perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga proses pengawasan aktivitas

masyarakat membuang sampah lebih efektif dan efisien. Saya rasa perlu adanya kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang tidak dapat melakukan sendiri dalam hal melaksanakan peraturan daerah, karena satuan polisi pamong praja sebagai eksekutor di lapangan untuk menindak masyarakat yang melanggar aturan.

2. Pemerintah Kota Bontang sebaiknya melakukan berbagai upaya protektif untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif sampah di sekitar TPS.
3. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang agar dapat meningkatkan proses dan mengawasi pengangkutan sampah supaya dalam pengangkutan tidak mengalami keterlambatan seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat Kota Bontang.
4. Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pengelolaan sampah dan melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada seluruh stakeholder, khususnya masyarakat secara kontinu hal ini penting untuk mendorong masyarakat sebagai elemen terbesar di dalam sistem persampahan dan lebih mengoptimalkan prinsip-prinsip 3R yang prosesnya adalah pemilahan sampah dalam penempatan sampah, selain itu masyarakat perlu diberdayakan agar memiliki komitmen didalam pengelolaan sampah. Sampah-sampah yang masuk ke TPA sebaiknya sudah dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menambah instensitas sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar tidak hanya sesekali tetapi bisa dilakukan berkali-kali agar masyarakat menjadi paham bagaimana mengelola sampah yang baik sedang kanuntukpendanaan di bidang kebersihan, sebaiknya Pemerintah Kota Bontang lebih memprioritaskan daerah atau lingkungan yang cepat menghasilkan sampah atau dengan kata lain daerah yang jumlah penduduknya lebih banyak.
6. Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu menambah armada-armada pengangkut sampah berupa motor oprasioanal roda 3 disetiap RT sehigga pengambilan sampah dapat maksimal dan mempermudah masyarakat.
7. Kepada masyarakat sebaiknya perlu meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar agar lebih terawatt dan tertata rapi. Serta membudidayakan sikap untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai pada jam yang telah ditentukan pemerintah. Agar dapat terjalinnya kerjasama yang efektif antara masyarakat dan pemerintah guna memanfaatkan sampah agar bisa didaur ulang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustino, 2006 *Pengantar analisis kebijakan formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Budi Winarno 2002 *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara
- Cunningham 2004 *Sampah Dan Penanggulaganya*. Bandung: Titian Ilmu.
- Edward III, Van Matter dan Horn, Mazmanian dan Sabatier, Grindle, Hoogwood dan Gun serta Elmore 2005 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:Cipta karya
- Edward III dalam Widodo 2001 *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Edward III dalam Ekowati 2005 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:Cipta Karya
- J. Moleong 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bandar Maju
- Mustopadidjaja AR 2009 *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, BPF.
- Mochtar 2007 *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP
- Tilaar dan Nugroho 2008 *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid I dan II, Edisi Ketiga, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung
- Tchobanoglous 2003 *Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issue*. McGraw-Hill.
- Webster 2005 *Proses Penetapan Kebijaksanaan*, terjemahan: Ardian SyMnsutlin, Jakarta: Erlangga
- Wahab 2008 *Pengantar Analisi Kebijakan Negar*, Jakarta:Rineka Cipta
- Winarno 2007 *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta
- William.N. Dunn 2000 *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. New Jersey : Prentice Hall
- Widodo 2004 *Langkah Analisis Perumusan dan Saran Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara